

# Kajian Literatur tentang Perkembangan Historis dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah di Indonesia

*Literature Review on Historical Development and Da'wa Transformation of Tarbiyah Movement in Indonesia*

**Ai Fatimah Nur Fuad**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA  
[fatimah\\_nf@uhamka.ac.id](mailto:fatimah_nf@uhamka.ac.id)

DOI: <http://doi.org/10.31291/jlk.v17i2.744>

Received: Juli 2019; Accepted: Januari 2020; Published: Februari 2020

## **Abstract**

*This research analyses the historical development of the Tarbiyah movement in Indonesia. Specifically, it analyses on how and to what extent the da'wa of the Tarbiyah movement has been transformed due its changing of religious, social and political dynamics of Indonesia since 1970s until now. Based on this written document-based research, I argue that the gradual transition of the Tarbiyah movement from a politically repressed network of religious purists in the 1970-80s into a fully-fledged dakwah political party (the Prosperous Justice Party /PKS) was the outcome of new 'political opportunities' which emerged during a period of democratisation. The political situation during the time of the Tarbiyah movement's emergence in the early 1980s saw state repression of Islamic movements and this constraint on political opportunity structures was one of the main factors causing the Ligo to be informally organised. Only in the post-New Order period (begun in 1998) did the movement start to generate its formal organizational structure in the shape of a political party named the PK(S). The move towards formality aimed to take advantage of the 'political opportunity' provided by a more democratic government, while the less formal and the informal aspects of their organisation supports the party in recruiting new members and mobilizing its sympathisers.*

**Key words:** *Da'wa, Tarbiyah movement, PKS, Politics, Indonesia.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perkembangan historis gerakan Tarbiyah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana dan sejauhmana dakwah gerakan Tarbiyah ini telah mengalami transformasi disebabkan oleh perubahan dinamika keagamaan, sosial, dan politik Indonesia sejak tahun 1970-an sampai saat ini. Berdasarkan penelitian berbasis analisa dokumen tertulis untuk ini, saya berpendapat bahwa transisi bertahap gerakan Tarbiyah dari jaringan agama puritan yang ditekankan secara politis pada tahun 1970-1980-an menjadi sebuah partai politik dakwah pada akhir 1990-an adalah hasil dari peluang politik atau '*political opportunity*' yang muncul selama periode demokratisasi. Situasi politik selama masa kemunculan gerakan Tarbiyah pada awal 1980-an menyebabkan represi negara atas gerakan Islam dan kendala pada struktur kesempatan politik ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan *liqo* diorganisir secara informal. Pada periode pasca-Orde Baru (dimulai pada tahun 1998) gerakan ini mulai menghasilkan struktur organisasi formal dalam bentuk partai politik bernama PKS. Langkah perubahan menuju formalitas bertujuan untuk mengambil keuntungan dari 'peluang politik' yang dibuka oleh pemerintah yang lebih demokratis, sementara aspek yang kurang formal dan informal dari organisasi /gerakan mereka tetap bisa mendukung partai dalam merekrut anggota baru dan memobilisasi simpatisannya.

**Kata Kunci:** Dakwah, Gerakan Tarbiyah, PKS, Politik, Indonesia.

**Pendahuluan**

Iklim politik yang berubah dan negara yang lebih demokratis di era pasca Orde Baru dari akhir 1998 mendorong munculnya berbagai kelompok Islam revivalis seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal-Jama'ah (FKAWJ) di ruang publik.<sup>1</sup> Selain itu, partai-partai politik Islam baru yang didasarkan pada ideologi revivalis (termasuk Partai Bulan Bintang atau PBB dan Partai Masyumi Baru) didirikan setelah liberalisasi sistem politik

---

<sup>1</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy; Piety and Pragmatism*, (Singapore: ISEAS, 2010) dan Jamhari & Jajang Jahroni (eds.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Indonesia, yang menjamin hak-hak rakyat untuk mendirikan partai dan organisasi sosial.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, munculnya negara demokratis juga dilihat oleh gerakan Tarbiyah sebagai peluang untuk memperkuat dan memperluas gerakan dakwahnya di luar ranah privat ke ranah publik dan domain negara, melalui pendirian partai politik, yang dinamai Partai Keadilan (PK).

Keberadaan dan sepak terjang PK yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kancah politik nasional Indonesia, telah menyedot perhatian cukup banyak peneliti baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri untuk melakukan kajian mengenai berbagai aspek yang terkait dengan partai Islam ini. Sebagian kajian fokus hanya kepada aspek politiknya, sebagian lagi adalah kajian yang mengaitkan profil politik PKS saat ini dengan dakwah gerakan Tarbiyah yang menjadi embrio atau akar kehadiran PKS di Indonesia.

Tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan historis dakwah gerakan Tarbiyah yang muncul di Indonesia pada tahun 1983, alasan pendirian partai politik pada tahun 1998, perkembangannya setelah pendirian partai dan bagaimana hal ini berdampak pada konsep dan strategi dakwahnya. Diskursus yang berkembang di kalangan pimpinan gerakan Tarbiyah mengenai konsep dan strategi dakwahnya akan ditinjau melalui ulasan teks yang diterbitkan secara resmi oleh organisasi ini atau diterbitkan secara lebih informal (non-organisasional) oleh kader-kadernya.

Untuk mengeksplorasi topik ini saya akan menggunakan teori gerakan sosial atau Social Movement Theory (SMT).<sup>3</sup> Walaupun riset saya berada dalam lingkup kajian Islam dan etnografi, saya meminjam teori ini dari disiplin ilmu politik. SMT adalah pendekatan interdisipliner dalam ilmu sosial yang secara umum berupaya menjelaskan tindakan kolektif dan secara

---

<sup>2</sup>Bernard Platzdasch, *Islamism in Indonesia; Politics in the Emerging Democracy*, (Singapore: ISEAS, 2009); Marcus Mietzner, *Military, Politics, Islam and the State in Indonesia; from turbulent transition to democratic consolidation*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009).

<sup>3</sup>Quintan Wiktotowicz (ed), *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach*, (Indiana: Indiana University Press, 2004); Jonathan Fox, *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*, (New York: Routledge, 2012).

khusus menjelaskan gerakan sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana sebuah gerakan sosial mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan respons mereka terhadap perubahan sosial, membangun identitas bersama (*collective identity*) di antara para anggotanya, dan melakukan mobilisasi dukungan, juga mempertimbangkan bagaimana perubahan konteks dan dinamika politik mempengaruhi gerakan.

Namun, teori gerakan sosial atau SMT yang telah sering digunakan umumnya berkaitan dengan konteks masyarakat Barat.<sup>4</sup> Ini telah mendorong para sarjana seperti David Snow dan Susan Marshall (1984),<sup>5</sup> dan yang lebih baru, Quintan Wiktorowicz (2001; 2004),<sup>6</sup> untuk menggunakan SMT dalam konteks masyarakat Muslim. Dalam konteks di masyarakat Barat, gerakan sosial sering merupakan sebuah organisasi formal. Namun berdasarkan penelitian Wiktorowicz (2001) terhadap gerakan Salafi di Yordania, ia menemukan bahwa gerakan Islamis yang menghadapi penindasan negara lebih cenderung menggunakan jaringan non-formal atau komunitas yang bersifat informal untuk melakukan sebuah tindakan kolektif.<sup>7</sup>

Dengan demikian, karena sifat informalnya mereka juga dapat menggunakan sarana yang 'tidak terlihat' di depan umum untuk melakukan mobilisasi diantara para pendukungnya dan membangun sebuah gerakan. Contoh penelitian lain yang menggunakan SMT untuk mengkaji Islamisme adalah Carrie Wickham (2002) dan Abdullah al-Arian (2014) yang meneliti tentang konteks masyarakat Mesir.<sup>8</sup> Adapun kajian mengenai masyarakat Muslim di luar

---

<sup>4</sup>Quintan Wiktotowicz (ed), *Islamic Activism...*, h. 4.

<sup>5</sup>David Snow dan Susan Marshall, "Cultural Imperialism, Social Movements, and the Islamic Revival", in *Research in Social Movements, Conflict and Change*, 1984, 7), h.131-152.

<sup>6</sup>Quintan Wiktorowicz, *The Management of Islamic Activism; Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan*, (New York: State University of New York, 2001); Quintan Wiktorowicz (ed), *Islamic Activism...*

<sup>7</sup>Quintan Wiktorowicz, *The Management of ...*

<sup>8</sup>Carrie Wickham, *Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt*, (New York: Columbia University Press, 2002) dan Abdullah al-Arian. *Answering the Call; Popular Activism in Egypt (1968-1981)*, (New York: Oxford University Press, 2014).

Mesir dilakukan oleh Jenny White (2002) dan Jenny Clark (2004).<sup>9</sup> Namun, dalam konteks di Indonesia, SMT belum banyak digunakan untuk menganalisis gerakan Islam seperti PKS/ gerakan Tarbiyah.

Penelitian saya sengaja memilih menggunakan SMT agar lebih menjelaskan bagaimana gerakan Tarbiyah mempertahankan skala formalitas dan informalitas yang berbeda. Sebagai sebuah gerakan, Tarbiyah harus berpikir tentang bagaimana mempertahankan aspek formal, kurang formal dan informal dalam gerakan mereka.

Gerakan ini masih dapat dianggap sebagai gerakan non-formal dalam beberapa hal karena dibentuk oleh jaringan yang memulai keberadaan mereka di luar parameter organisasi politik formal. Di awal kemunculannya, gerakan Tarbiyah tidak memiliki struktur organisasi formal, seperti yang saat ini sering diasosiasikan dengan PKS atau setelah berdirinya PKS. Gerakan ini yang utama sekali masih terdiri dari kelompok-kelompok kecil atau 'sel'. Masing-masing terdiri dari hanya sejumlah kecil orang yang mirip dengan struktur dasar dari 'prototipikal' gerakan Islamis yaitu Ikhwanul Muslimin di Mesir.<sup>10</sup>

Penelitian ini berupaya melakukan investigasi terkait wacana resmi pimpinan gerakan Tarbiyah, mengingat bahwa pergeseran Indonesia ke sistem politik yang lebih demokratis mendorong mereka untuk beralih dari struktur dan organisasi gerakan informal (gerakan dakwah) ke yang lebih formal (partai politik). Para elit ini berharap bahwa gerakan Tarbiyah dapat mencapai dakwahnya secara lebih efektif melalui sebuah partai politik. Sebagai hasilnya, konsep dakwahnya kemudian berkembang menjadi fokus pada kesalehan publik selain kepada pembentukan dan peningkatan kesalehan individu. Aspek dakwah 'privat' (fokus kepada kesalehan individu) sangat penting sejak kemunculan gerakan ini di awal 1980-an hingga saat ini. Namun, selama

---

<sup>9</sup>Jenny White, *Islamist Mobilization in Turkey; a study in a vernacular politics*, (Seattle: Washington University Press, 2002) dan Jenny Clark, *Islam, Charity and Activism: Middle Class Network and Social Welfare in Egypt, Jordan and Yemen*, (Bloomington: Indiana University Press, 2004).

<sup>10</sup>Peter G. Mandaville, *Global Political Islam*, (London: Routledge, 2007).

1990-an, dan periode pasca-Orde Baru (1998-sekarang) khususnya, mereka melihat adanya kesempatan (*political opportunity*) untuk mengembangkan dakwah privat mereka sejalan dengan aspek sosial dan politik dari ideologi mereka.

Oleh karena itu, tiga tahap proses dakwah yang diartikulasikan oleh Ikhwanul Muslimin Mesir—pribadi, sosial dan politik—sekarang berjalan berdampingan (*co-exist*) dalam kegiatan dakwah/politik gerakan Tarbiyah/PKS. Namun demikian, saya berpendapat bahwa konsep dakwah pribadi dan publik ditekankan secara berbeda oleh anggota yang semakin senior yang terlibat dalam gerakan tersebut. Saya melihat bahwa meskipun gerakan ini mengklaim bahwa membangun kesalehan individu tetap merupakan konsep utama dakwah gerakan Liqo-Tarbiyah, ko-eksistensi dari kesalehan individu, kesalehan publik, dan kepentingan politik menghasilkan ketegangan ketika gerakan tersebut mulai melakukan dakwahnya secara lebih terbuka. Artikel ini turut berkontribusi memperluas literatur yang sudah ada mengenai munculnya ‘ketegangan’ internal dalam gerakan Tarbiyah. Dalam penelitian saya, ‘ketegangan’ atau perselisihan internal yang terjadi disebabkan oleh ko-eksistensi berbagai orientasi dakwah yaitu kesalehan pribadi dan kesalehan publik bersamaan dengan kepentingan/orientasi politik.

Artikel ini dimulai dengan menjelaskan profil gerakan Tarbiyah di Indonesia, kemunculannya pada tahun 1983, dan ideologi dakwahnya. Ini diikuti oleh bagian yang menggambarkan gerakan dakwah dalam periode formatif ini. Meskipun dakwah mereka selama periode ini fokus pada reformasi religiusitas individu untuk menciptakan gaya hidup yang lebih Islami, ide untuk melakukan reformasi atau Islamisasi masyarakat juga merupakan bagian dari agenda jangka panjang dakwah mereka sejak awal.

Fokus pada dakwah individual ini didasarkan pada keyakinan gerakan bahwa melakukan reformasi kesalehan individu adalah fondasi untuk membangun kondisi masyarakat Islam yang lebih baik. Namun, seperti yang disebutkan di atas, saya berpendapat bahwa kondisi dan kendala politik yang menekan gerakan Islam di Indonesia selama tahun 1970-an dan awal 1980-an juga menyebabkan gerakan Tarbiyah untuk menyebarkan pesan dakwah

mereka secara diam-diam atau membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyebarkan dakwah mereka secara lebih terbuka kepada publik.

Pada bagian selanjutnya, saya kemudian menjelaskan perkembangan dakwah gerakan dengan merujuk pada perubahan iklim politik di Indonesia, di mana pemerintah mulai menjadi lebih akomodatif terhadap kelompok-kelompok Islam pada akhir 1980-an. Saya berpendapat bahwa perubahan sikap pemerintah membuat para aktivis Tarbiyah melakukan dakwah mereka secara lebih terang-terangan, meskipun orientasi dakwah mereka masih fokus pada reformasi kesalehan individu.

Saya juga menunjukkan mengapa gerakan Tarbiyah memutuskan untuk mendirikan partai politik Islam pada tahun 1998, dan apa implikasinya terhadap gerakan dakwah mereka. Penelitian saya mengungkapkan bahwa alasan utama untuk mendirikan partai ini adalah kepercayaan pada integrasi Islam dan politik yang dikombinasikan dan diperkuat dengan harapan bahwa partai tersebut dapat secara signifikan mendukung dakwah mereka. Munculnya gerakan Tarbiyah tidak dapat dipisahkan dari kritik mereka terhadap fenomena modern dan Barat yang telah mempengaruhi kehidupan Muslim. Mereka percaya perlunya dakwah aktif melalui partai politik sehingga umat Islam dapat terhindar dari pengaruh ideologi dan budaya non-Islam (Barat).

Di bagian selanjutnya, saya membahas elemen-elemen yang lebih kompleks dari konsep dakwah gerakan Tarbiyah. Saya berpendapat bahwa gerakan ini tidak hanya berfokus pada penguatan kesalehan individu anggotanya, tetapi juga mendesak mereka (melalui partai) untuk terlibat dalam urusan publik dan lembaga negara untuk mengendalikan moralitas publik dan melakukan Islamisasi masyarakat dan negara.

## **Pembahasan**

### **1. Gerakan Tarbiyah pada Periode Pemerintahan yang Represif (1970-1980)**

Tahun 1970-an dan 1980-an adalah era di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ketat untuk mengendalikan politik Islam. Itu adalah era yang sulit dan menantang bagi kelompok Islamis di Indonesia untuk melakukan kegiatan dakwah

terbuka. Pemerintah melarang para pemimpin Muslim untuk terlibat dalam urusan politik, seperti membentuk partai-partai Islam atau mendiskusikan masalah-masalah politik di ruang publik.<sup>11</sup> Para pemimpin terkemuka Masyumi - partai politik Islam terbesar di masa Orde Lama (1945-1965) - adalah salah satu contoh terkenal dari partai yang dilarang pemerintah terlibat dalam politik selama periode ini.

Demikian pula, partai Masyumi tidak diizinkan untuk aktif.<sup>12</sup> Ini tidak diharapkan oleh para pemimpin Masyumi yang pada awal Orde Baru (akhir 1960-an hingga awal 1970-an) berharap bahwa partai akan dapat berpartisipasi dalam kontes politik lagi setelah dibubarkan oleh Pemerintahan Orde Lama pada periode kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, para pemimpin Muslim lainnya yang berbicara tentang masalah politik di ruang publik, seperti di masjid, sekolah, dan kampus, juga diawasi ketat oleh pemerintah. Menurut Yudi Latif, para pemimpin Muslim di era ini, terutama kaum Islamis, mengalami 'dislokasi sosial-politik yang akut' yang dibentuk oleh sikap represif negara.<sup>13</sup>

Dalam konteks sosial politik seperti itu, banyak pemimpin Islam, dan terutama mereka yang terlibat dalam Masyumi, berusaha untuk membangun gerakan keagamaan baru yang tidak memiliki orientasi politik.<sup>14</sup> DDII adalah kendaraan baru bagi gerakan keagamaan mereka. Mereka menggunakan masjid kampus sebagai tempat untuk melatih dan mendidik kaum muda, membangun dan memperkuat identitas Islam dan solidaritas kolektif mereka. Dengan demikian program-program Bina Masjid Kampus dan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) memberikan alternatif bagi calon aktivis kampus Muslim.<sup>15</sup> Pemilihan masjid-masjid ini menunjukkan bahwa gerakan itu menargetkan masyarakat kelas menengah yang berpendidikan. Para pemimpin Islam secara

---

<sup>11</sup>Bachtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2003).

<sup>12</sup>Bachtiar Effendy, *Islam and the State...*

<sup>13</sup>Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intellegentsia and Power*, (Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2008), h. 369.

<sup>14</sup>Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intellegentsia ...*h. 369-371.

<sup>15</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy.....*; Platzdasch, *Islamism in Indonesia ...*



bertahap memainkan peran penting dalam membangun fenomena baru mahasiswa yang berorientasi dakwah di universitas-universitas umum. Fenomena ini menyebar dari satu kota besar ke kota besar lainnya, dan menciptakan apa yang disebut sebagai *'Islamic turn'*.<sup>16</sup>

Gerakan Tarbiyah awal muncul dari aktivitas gerakan Islam yang seperti disebutkan di atas. Pada awal gerakan dakwahnya, komunitas ini tidak memiliki nama. Kemudian, gerakan ini secara bertahap dikenal di kalangan anggota internal sebagai komunitas *usrah* (keluarga) yang terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin.<sup>17</sup> Istilah *usrah* belum begitu akrab bagi masyarakat luas saat itu. Pada awal 1980-an, jamaah Tarbiyah dianggap sebagai organisasi bawah tanah yang disebut OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) atau OBT (Organisasi Bawah Tanah). Dalam literatur disebutkan bahwa gerakan Tarbiyah atau sering juga disebut dengan Jamaah Tarbiyah yang secara resmi didirikan oleh Hilmy Aminuddin,<sup>18</sup> Salim Segaf al-Jufri,<sup>19</sup> Abdullah Baharmus, dan Encep Abdusyukur (a.k.a Acep Abdusyukur) pada tahun 1983, dan didedikasikan untuk dakwah.<sup>20</sup> Walaupun tahun 1983 sering disebut sebagai

---

<sup>16</sup>Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intellegentsia* .....h. 371.

<sup>17</sup>Ikhwanul Muslimin Mesir secara resmi menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada sistem perekrutan dan penguatan ideologi anggotanya (Richard Mitchell, *The Society of the Muslim Brothers*. (Oxford: Oxford University Press, 1993). Mereka menggunakan system keluarga (*family system* atau *nizam al-usrah*) dalam kegiatan dan proses tarbiyah mereka. Satu grup terdiri dari 6-10 orang anggota, dimana satu orang dipilih menjadi pemimpin dari grup tersebut, seperti halnya kepala keluarga dalam sebuah keluarga. Sistem ini mengumpulkan banyak orang yang diikat dalam satu interes keagamaan yang sama yaitu untuk mendidik (*tarbiyah*) mereka dan menyiapkan mereka agar dapat melakukan tugas dakwah dalam melakukan islamisasi masyarakat dan negara.

<sup>18</sup>Hilmy Aminuddin pernah menjadi ketua Majelis Syura PKS. Ia merupakan lulusan dari universitas Islam, Madinah (sumber: Bayan DSP-PKS, 21 Syawwal 1429/21 Oktober 2008, diakses dari situs resmi [www.pk-sejahtera.org](http://www.pk-sejahtera.org)).

<sup>19</sup>Salim Segaf Al-Jufri adalah cucu pendiri lembaga pendidikan terkenal, "al-Khairat", di Makassar, Sulawesi (sumber: Bayan DSP-PKS, 21 Syawwal 1429/21 Oktober 2008, diakses dari situs resmi [www.pk-sejahtera.org](http://www.pk-sejahtera.org)).

<sup>20</sup>Ahmad Norma Permata, A study on the internal dynamics of the Justice and Welfare Party (PKS) and Jama'ah Tarbiyah, in *Regime change*,

tahun berdirinya gerakan Tarbiyah, namun sejarah gerakan ini sebetulnya bisa dilacak ke tahun 1968. Tahun 1968 adalah tahun ketika Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), yang dipimpin oleh Muhammad Natsir,<sup>21</sup> menginisiasi program dakwah di kampus-kampus melalui program Bina Masjid Kampus (BMK) dan mengadakan kegiatan Latihan Mujahid Dakwah (LMD).

Dua tokoh kunci dan pendiri gerakan Tarbiyah yaitu Abu Ridho dan Mashadi adalah peserta program LMD.<sup>22</sup> Selain dua tokoh kunci ini, dalam beberapa literatur, disebut juga sebagai pendiri gerakan Tarbiyah yaitu Abdi Sumaiti (dikenal juga dengan panggilan Abu Ridho) dan Hilmy Aminuddin. Program LMD ini fokus untuk melatih kader-kader baru dari kalangan mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan dakwah.<sup>23</sup> Tokoh yang paling berpengaruh dalam kegiatan LMD ini adalah pimpinan DDII, yaitu Imaduddin Abdurrachim.<sup>24</sup>

Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, Imaduddin Abdurrachim—yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Imad—merupakan tokoh utama yang mengenalkan konsep pengajian. Pengajian seperti ini kemudian menjadi model untuk perkumpulan-perkumpulan kegiatan keagamaan lain di masjid-mesjid kampus di Indonesia.<sup>25</sup> Salahsatu masjid kampus yang sangat sukses dalam menarik banyak mahasiswa untuk mengikuti program ini adalah Institut Teknologi Bandung (ITB) di mana

---

*democracy, and Islam: the case of Indonesia*, (Leiden: Universiteit Leiden, 2013).

<sup>21</sup>Audrey R. Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir*, (Singapore: NUS Press, 2012).

<sup>22</sup>A. Luthfi, *Gerakan Dakwah di Indonesia*, In Ash-Shidiqy, J. (ed.) *Bang Imad: Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya*, (Solo: Gema Insani Press, 2002).

<sup>23</sup>Bernard Platzdasch, *Islamism in Indonesia ...*

<sup>24</sup>Dalam membangun dan menjalankan LMD ini, Bang Imad, bersama dengan Endang Saefuddin Anshari (1938-1996), secara pribadi didukung oleh tokoh utama DDII, Natsir. Dia juga telah ditunjuk sebagai sekretaris jenderal Federasi Organisasi Mahasiswa Islam Internasional (IIFSO) yang berbasis di Kuwait dan kemudian menjadi pendiri ICMI (Latif, 2008; Robert Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, (Princeton: Princeton University Press, 2000).

<sup>25</sup>Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002).

Bang Imad menjadi tokoh sentral di Mesjid Salman ITB.<sup>26</sup> Dari sini gerakan Tarbiyah mulai mengadakan pengajian, *usrah*, atau *halaqah* di masjid Salman ini.<sup>27</sup>

Hubungan antara DDII dan kemunculan gerakan Tarbiyah dapat dilihat tidak hanya melalui adanya pelatihan LMD tetapi juga terlihat melalui berbagai cara lain seperti mengirim siswa untuk belajar di universitas Arab Saudi dan Mesir, kemudian memfasilitasi lulusannya untuk menjadi mentor yang terlibat dalam pengajaran Islam dan menyebarkan ide-ide Islam di masjid-masjid universitas, dan menerjemahkan, menerbitkan, dan mengedarkan buku-buku yang ditulis oleh para ideolog dakwah Islam seperti Sayyid Qutb, Hasan al-Banna dan Abu A'la al-Mawdudi.<sup>28</sup>

Empat pendiri utama gerakan Tarbiyah merasa khawatir tentang fenomena sebagian Muslim Indonesia yang hidup di luar nilai-nilai Islam. Lalu keempat pendiri ini menginisiasi gerakan dakwah yang mengajak umat Islam untuk kembali hidup sesuai dengan Islam. Dalam mengembangkan gerakan dakwah mereka, mereka sangat terinspirasi dan dipengaruhi oleh pola dakwah Ikhwanul Muslimin Mesir. Permata menyebut gerakan Tarbiyah sebagai 'Ikhwanul Muslimin cabang Indonesia'.<sup>29</sup> Bukti nyata

---

<sup>26</sup>Bahkan sudah ada kajian khusus mengenai gerakan Tarbiyah di kampus ITB, lihat Arditya Prayogi, *Masuk dan Berkembangnya gerakan Tarbiyah, Studi Kasus: Gerakan Dakwah Kampus di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) 1983-1998*, *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 1(1) 2019. hal. 45-57. Prayogi menyimpulkan bahwa perkembangan dakwah kampus secara nasional berawal dari ITB, dan itu adalah dakwah gerakan Tarbiyah.

<sup>27</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy...*

<sup>28</sup>Program-program ini didanai oleh pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari strategi untuk mempromosikan ide-ide Wahhabi/Salafi (Hasan, 2005). Sebagai hasil dari program-program tersebut, DDII memiliki dampak besar pada perubahan wacana Islam di Indonesia (Martin Van Bruinessen, *Ghazwul fikri or Arabisation? Indonesian Muslim responses to globalisation*. In Ken Miichi and Omar Farouk (eds.), *Dynamics of Southeast Asian Muslims in the era of globalization* (Tokyo: Japan International Cooperation Agency Research Institute (JICA-RI), 2013). h. 47-70. Lihat juga Masdar Hilmy, *Islam and Democracy...*

<sup>29</sup>Ahmad Norma Permata, *A Study on the Internal Dynamics ...*,h. 241. Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa mereka tidak pernah secara

bahwa gerakan Tarbiyah dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin adalah penggunaan istilah *ikhwan* atau *akhi* untuk panggilan kepada kader laki-laki dan *akhawat* atau *ukhti*, sebagai panggilan kepada kader perempuan. Istilah 'kader' mengacu pada anggota organisasi yang disiplin dan memiliki komitmen yang tinggi.<sup>30</sup>

Istilah *mutarabbi* dan *murabbi* juga merupakan akar dari istilah *tarbiyah* (pendidikan). Penggunaan istilah *mutarabbi* dan *murabbi* di antara komunitas *liqo* adalah hasil dari pengaruh Ikhwanul Muslimin di Mesir juga. Pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna dan anggota-anggotanya menggunakan istilah-istilah ini karena berasal dari tradisi *syaiikh-murid* dalam tarekat Sufi.<sup>31</sup> *Mutarabbi* adalah istilah bahasa Arab untuk peserta *liqo* laki-laki, dan *mutarabbiah* adalah istilah untuk peserta *liqo* perempuan, sementara *murabbi* adalah mentor laki-laki dan *murabbiah* adalah mentor perempuan di dalam *liqo*.<sup>32</sup>

Selama tahap awal gerakan Tarbiyah, para pemimpin atau mentornya membuat kelompok-kelompok kecil untuk sesi belajar agama reguler, yang disebut *liqo* atau *halaqah*. Pengelompokan seperti sel ini terdiri dari satu mentor atau pelatih yang bertugas merekrut, melatih, membina dan rutin mengontrol 6-10 orang pesertanya.<sup>33</sup> Meskipun kelompok *liqo* itu sebenarnya kecil, tetapi seluruh anggotanya memiliki komitmen kuat untuk bertemu sekali dalam setiap minggu.

---

eksplisit menyatakan gerakan Tarbiyah sebagai cabang Ikhwanul Muslimin Mesir di Indonesia.

<sup>30</sup>Seperti banyak literatur tentang aktivisme Islam yang ditulis oleh para peneliti internasional, seperti Wiktorowicz (2001) mencatat bahwa 'kader' adalah salah satu aspek yang paling kuat dari suatu gerakan dakwah Islam. Ini digunakan dalam tradisi Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam lainnya.

<sup>31</sup>Brynjar Lia, *The Society of the Muslim Brothers in Egypt: the rise of an Islamic mass movement 1928-1942*, (Reading: Ithaca Press. 1998).

<sup>32</sup>Model relasional komunitas *liqo* ini dikonfirmasi oleh seorang aktivis senior *liqo*, yang mencatat bahwa (idealnya) hubungan antara peserta pelatihan dan mentor mereka di *liqo* melampaui hubungan formal antara guru dan siswa seperti yang terjadi di kelas-kelas atau komunitas lain karena mereka sangat dekat sekali baik selama (didalam) kegiatan *liqo* maupun di luar sesi *liqo*.

<sup>33</sup>Ahmad Norma Permata, *A Study on the Internal Dynamics ...*

Selama *mihwar tanzimi* (masa pembentukan), program-program *liqo* dilakukan di tempat-tempat yang sempit dan tertutup dari pandangan orang lain, seperti dapur, sudut-sudut musala, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan mereka untuk duduk atau melingkar mengikuti pengajian agama.<sup>34</sup> Demikian juga, mereka menyembunyikan struktur organisasi dan mentor, serta koordinator gerakan Tarbiyah dan program pelatihan setiap minggunya. Selama rezim represif ini, mereka memiliki visi bahwa organisasi (struktural) mereka adalah rahasia sedangkan dakwah mereka bersifat universal '(*sirriyah al-tanzim wa 'alamiyah al-dakwah*).<sup>35</sup>

Sifat rahasia organisasi ini berpengaruh terhadap proses 'diam-diam' dalam merekrut kader baru gerakan Tarbiyah di masa lalu. Perekrutan anggota baru untuk sesi pertemuan mingguan pada saat itu hanya dilakukan di antara orang-orang terdekat dari anggota yang sudah ada, dan tidak secara terbuka di kalangan masyarakat luas. Kemudian, sesi pelatihan mingguan ini secara bertahap dikenal sebagai *liqo*.<sup>36</sup> Program *liqo* ini memiliki jumlah anggota (*mutarabbi*) dan mentor (*murabbi*) yang sangat terbatas

---

<sup>34</sup>Duduk melingkar (membuat lingkaran) adalah salahsatu ciri khas gerakan Tarbiyah. Dengan duduk melingkar, memudahkan mentor dalam menyampaikan materi kajian agama (selama *liqo*) kepada murid-muridnya dan memudahkannya untuk memantau perkembangan wawasan keagamaan murid-muridnya. Selain itu melingkar juga mengintensifkan interaksi antar sesama murid.

<sup>35</sup>DPP-PKS, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Bandung: DPP PKS dan PT Syamil Cipta Media, 2003) h.27. Berdasarkan apa yang saya lihat dalam perkembangan gerakan Tarbiyah saat ini, sifat 'rahasia' diatas hanya muncul pada awal gerakan Tarbiyah di bawah rezim refresif Soeharto. Sifat rahasia mengenai ideology atau hierarki dakwah mereka tidak lagi diterapkan oleh para aktivis Tarbiyah saat ini, karena situasi hari ini berbeda dengan situasi di periode awal kemunculannya, dan tidak ada lagi kebutuhan/kondisi yang mengharuskan mereka untuk menyembunyikan struktur gerakan dakwah mereka.

<sup>36</sup>*Liqa* adalah satu unit kecil aktifitas kajian keagamaan yang diadakan rutin setiap minggu di rumah salahsatu anggota/member *liqo*. Kajian mingguan ini disebut juga dengan *halaqah*. *Liqa* dan *halaqah* bertujuan sama yaitu untuk mengajarkan dan memperdalam doktrin dan ideology gerakan Tarbiyah kepada para anggotanya mulai dari level keanggotaan paling pemula sampai level paling tinggi.

pada awal 1980-an, tetapi pada pertengahan 1980-an, mereka telah berhasil merekrut jumlah yang lebih besar yaitu mahasiswa dan orang-orang profesional terdidik yang tertarik mempelajari Islam melalui kegiatan *liqo* ini.

Pada fase awal ini, tidak ada bahan atau metode yang terstruktur atau terorganisasi dengan baik yang digunakan dalam kegiatan *liqo* atau dalam kegiatan dakwah gerakan Tarbiyah secara keseluruhan. Hal ini dapat dimengerti mengingat fakta bahwa saat itu merupakan gerakan informal. Bahan ajar pada saat ini diambil dari berbagai sumber yang mengakomodasi berbagai alur pemikiran Islam. Juga tidak ada metode standar atau metode khusus yang dipilih untuk menyampaikan pesan agama. Terkait metode ini, sebagian besar diserahkan kepada keahlian dan pilihan masing-masing mentor.

Para kader di fase awal ini memperoleh keterampilan dakwah mereka dari interaksi mereka dengan orang-orang dan buku-buku yang memiliki hubungan dengan ideologi dakwah Ikhwanul Muslimin Mesir. Program *liqo* dan kegiatan dakwah secara keseluruhan kemudian secara bertahap dikembangkan oleh para pemimpin gerakan Tarbiyah dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para mentor, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat belajar para anggota, dan dengan menyediakan buku-buku keagamaan dan panduan untuk para mentor.

Awal 1980-an adalah periode di mana reformasi religiusitas individu ditekankan sebagai pesan utama dakwah gerakan Tarbiyah. Seperti yang ditulis dalam salah satu buku resmi gerakan Tarbiyah yaitu Manhaj Tarbiyah (2005),<sup>37</sup> pengembangan religiusitas individu adalah tujuan utama gerakan Tarbiyah pada periode ini.<sup>38</sup> Setelah bergabung dengan *liqo* atau kegiatan dakwah

---

<sup>37</sup>Lihat penjelasan yang membahas khusus tentang Manhaj Tarbiyah, Febrian Taufik Saleh, Manhaj Tarbiyah dalam pendidikan politik PKS, *Salam*, 18 (1), 2015. h.1-18.

<sup>38</sup>Untuk memperkuat pembentukan religiusitas individu, *liqo* selama fase awal terutama sekali membahas masalah kepribadian Islam. Subjek-subjek Tafsir, Hadis, Fikih, dan Sirah diajarkan kepada para aktivis Tarbiyah dengan tujuan menjadikan mereka Muslim yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penekanan gerakan Tarbiyah pada religiusitas individu dalam gerakan dakwah mereka didorong oleh keyakinan kuat mereka bahwa ‘per-

lainnya, para peserta diharapkan oleh gerakan Tarbiyah agar dapat mengembangkan religiusitas individu mereka, yang meliputi: 1) memiliki pemahaman tentang dasar Islam; 2) memiliki akhlak/moral yang baik; 3) tidak memiliki pengaruh dari penyembahan berhala atau kemusyrikan; dan 4) tidak memiliki hubungan dengan musuh Islam [baik secara individu atau institusi].<sup>39</sup> Selain itu, ditekankan juga dalam literatur mengenai gerakan ini, bahwa tujuan mereka adalah untuk menciptakan individu-individu dengan 'karakteristik' khusus yang dirancang oleh pimpinan gerakan Tarbiyah yang dikenal sebagai *al-muwashafat al-tarbawiyah*.<sup>40</sup>

Para pendiri gerakan Tarbiyah berhasil menarik demografi tertentu yang tertarik dengan karakteristik tarbawiyah ini untuk masuk dan bergabung dengan gerakan mereka. Demografi ini bercirikan muda, pelajar/profesional dan merupakan individu-individu dengan pendidikan umum yang cukup baik. Mereka kebanyakan adalah pendatang yang datang dari desa ke kota untuk belajar di institusi pendidikan tinggi atau bekerja di berbagai lembaga/perusahaan sebagai tenaga profesional. Meskipun rekrutmen baru ini berasal dari berbagai latar belakang dalam hal afiliasi agama dan sosial mereka, seperti kelompok Salafi, NU, Muhammadiyah, DDII, dan HMI, tetapi mereka terikat oleh manfaat dan tujuan yang sama yang disebutkan di atas.<sup>41</sup>

Ketertarikan para mahasiswa dan professional muda ini dalam menghadiri *liqo* dan mempelajari ideologi dakwah Tarbiyah didorong oleh motif yang sama dengan gerakan Tarbiyah itu sendiri.

---

baiknya kedalam diri sendiri' adalah solusi terbaik untuk masalah umat Islam. Gagasan religiusitas individu ini berusaha untuk membangun pemahaman agama yang lebih baik daridalam diri individu Muslim dan keterampilan untuk menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari mereka (DPP PKS, 2003: 1-3).

<sup>39</sup>DPP-PKS, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula...*, h. 5.

<sup>40</sup>DPP-PKS, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula...*, h. 5-9. Untuk membentuk 'karakteristik tarbiyah', kajian mingguan (*liqo*) sengaja diarahkan oleh pimpinan Tarbiyah untuk mengembangkan *syakhsiyah Islamiyah* (kepribadian Islam) para anggotanya, yang meliputi kepercayaan (akidah), ritual (ibadah), dan etika perilaku dan gaya hidup (adab-akhlak) Muslim.

<sup>41</sup>Yon Machmudi, *Islamizing Indonesia: the Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*, (Canberra: The Australian National University, 2006).

Mereka khawatir tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap Islam politik dan kecenderungan politik global yang menyebabkan terpinggirkannya Islam dari ruang publik. Mereka merasa perlu untuk merespon fenomena ini dan mengislamkan diri sendiri dan masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam *liqo*.

## **2. Gerakan Tarbiyah pada Periode Politik yang lebih Akomodatif (1990-1997)**

Tidak seperti pada dekade sebelumnya, dari akhir 1980-an, pemerintah Orde Baru (1986-1997) mulai mengakomodasi gerakan Islam. Pada periode ini, pemerintah mendukung organisasi Islam dengan cara mendirikan masjid-masjid.<sup>42</sup> Sekitar seratus masjid baru didirikan oleh pemerintah, yang juga memungkinkan pegawai negeri untuk mengekspresikan identitas agama (Islam) mereka di kantor-kantor negara dengan cara melakukan Salat Jum'at, memberikan ceramah tentang Islam, dan mengenakan pakaian Islami—faktor yang penting bagi Muslim perempuan pada khususnya.<sup>43</sup>

Fenomena seperti ini tidak terjadi selama tahun 1970-an dan paruh pertama 1980-an. Selanjutnya, pada tahun 1992, pemerintah mendukung dan bahkan membiayai para pemimpin Islamis dan tokoh-tokoh neo-revivalis dalam mendirikan sebuah organisasi Islam bernama ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).<sup>44</sup> Terlepas dari itu, perubahan sikap pemerintah juga merupakan strategi politik untuk menjinakkan publik dan mendapatkan dukungan politik dan legitimasi dari umat Islam dengan memberikan lebih banyak kebebasan dan keistimewaan bagi organisasi-organisasi Islam.

Saya berpendapat bahwa pergeseran sikap politik pemerintah, yang disambut oleh gerakan-gerakan Islam, mendorong gerakan Tarbiyah untuk mengambil keuntungan dari peluang untuk memperluas ruang lingkup dakwah mereka dan para kadernya. Sementara gerakan Tarbiyah sebelumnya fokus berdakwah di kampus-kampus dan menyebarluaskan ide-ide keagamaannya secara diam-diam. Gerakan Tarbiyah pada masa ini mulai

---

<sup>42</sup>Bachtiar Effendy, *Islam and the State....*

<sup>43</sup>Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intellegentsia ....*

<sup>44</sup>Robert Hefner, *Civil Islam....*



menargetkan kelompok-kelompok sosial yang lebih luas dari berbagai latar belakang, serta institusi, dan menyebarkan ide-ide dakwah dan keagamaannya secara lebih terbuka.

Pada titik ini, maka gerakan Tarbiyah mengalami pergeseran dari gerakan ‘bawah tanah’ yang melakukan kegiatan dakwah di tempat-tempat kecil dan marjinal ke gerakan yang lebih terbuka mempromosikan ide-idenya di tempat yang lebih besar dan bersifat umum. Pergeseran ini terjadi dikarenakan kondisi politik yang lebih kondusif, sehingga ruang lingkup dakwah bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. *Political opportunity* membuat gerakan Tarbiyah bisa menarget masyarakat luas dan memromosikan pemikiran keagamaannya secara lebih terbuka.<sup>45</sup>

Kader-kader senior gerakan Tarbiyah memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi dakwah mereka dari tempat kecil dan tertutup ke tempat umum, seperti kantor, masjid besar, sekolah, atau lembaga pendidikan, dan tempat umum lainnya. Para kader senior ini juga mendirikan layanan sosial dan pendidikan, seperti sekolah Islam dan lembaga keagamaan. Kegiatan pendidikan dan sosial ini mendukung gerakan Tarbiyah dalam memperluas audiens dakwah mereka di luar masjid universitas.

Literatur gerakan Tarbiyah menyebut periode ini sebagai *mihwar sha'bi* (fase masyarakat). Setelah mendalami beberapa literatur, saya menemukan bahwa istilah ini berarti bahwa anggota Tarbiyah yang dilatih pada periode sebelumnya sekarang diminta untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dan untuk mengambil bagian dalam mendidik masyarakat (*al-irsyad al-mujtama*).<sup>46</sup>

Pada periode ini, anggota Tarbiyah yang sudah memiliki karakteristik Tarbiyah yang khas (tamayuz) diharapkan oleh para pemimpin gerakan ini untuk menyebar dan melakukan dakwah verbal dan non-verbal ditengah masyarakat. Dakwah verbal di sini melibatkan seruan kepada kesalehan beragama dan non verbal

---

<sup>45</sup>Quintan Wiktotowicz (ed), *Islamic Activism...*; Jonathan Fox, *An Introduction to Religion and Politics...*

<sup>46</sup>MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani; Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, (Jakarta: MPP PKS, 2008), h. 57.

dengan cara menjadikan diri mereka sebagai teladan bagi masyarakat. Ada pedoman (kaidah) bahwa setiap kader harus berinteraksi dengan siapa pun dengan ‘keunikan’ Islam (*fa-l yakhtalithuun wa-laakin yatamayyazuun*). Pedoman ini tidak mengharuskan anggota untuk menjadi eksklusif, tetapi berbaur dalam masyarakat tanpa kehilangan ‘keunikan mereka’.

Para anggota *liqo* diminta oleh para pemimpin gerakan Tarbiyah untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang bersifat publik, seperti acara komunitas. Acara-acara publik bertujuan untuk menyebarkan ideologi gerakan dan juga untuk menarik anggota baru. Seperti gerakan Islam lainnya, interaksi sosial apa pun dilihat oleh gerakan *liqo*-Tarbiyah sebagai kesempatan untuk berdakwah. Selain itu, para aktivis Tarbiyah mulai memobilisasi kegiatan dakwah publik mereka melalui pusat pelatihan dan pendidikan, pusat amal, kegiatan budaya, layanan medis gratis, dan sebagainya.

Para kader Tarbiyah di periode ini mulai mengembangkan lembaga penerbitan seperti Rabbani Press, asy-Shamil, Intermedia, dan banyak lagi. Kader-kader memiliki banyak lembaga sosial, pendidikan, dan budaya, seperti lembaga untuk memberikan Zakat, infaq dan Sedekah (ZIS), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Lembaga Dakwah Sekolah (LDS), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan gerakan dakwah lainnya yang juga cukup banyak dikelola oleh aktivis perempuan Tarbiyah untuk perempuan Indonesia. Lembaga-lembaga ini didirikan oleh kader Tarbiyah sebagai bagian dari strategi dakwah mereka untuk mempromosikan pesan dakwah mereka kepada khalayak yang lebih luas dan untuk membantu orang memahami pesan dakwah mereka. Pusat-pusat kegiatan seperti ini adalah media utama interaksi antara komunitas Tarbiyah dengan komunitas lain di masyarakat yang lebih luas.

Hasilnya, pada awal dan pertengahan 1990-an ini gerakan Tarbiyah memiliki jaringan yang cukup baik selain di banyak universitas di kota-kota besar di seluruh negeri, dan “mulai ‘mengambil alih’ organisasi mahasiswa intra kurikuler dan ekstra

kurikuler”<sup>47</sup> tetapi juga jaringan yang semakin luas ditengah masyarakat.<sup>48</sup>

### 3. Gerakan Tarbiyah sebagai Partai Politik pada Periode Demokratik (1998-2003)

Meskipun sistem politik Indonesia telah lebih ‘mengakomodasi’ kelompok-kelompok Islam pada akhir pemerintahan Orde Baru (dari akhir 1980-an hingga awal 1998), munculnya rezim baru pada tahun 1998 membangkitkan harapan baru dan harapan lebih besar di antara para senior gerakan Tarbiyah dan anggotanya, yang memungkinkan mereka untuk lebih memperkuat keterlibatan mereka di arena publik. Dari 1998, gerakan Tarbiyah terbuka bagi kelompok mana pun, baik Islam atau sekuler, untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun.

Dengan demikian, 1998 dianggap oleh gerakan Tarbiyah sebagai tanda dimulainya fase dakwah baru yang disebut *mihwar mu'assasi* (fase penetrasi politik) atau *al-'am al-intikhabi* (periode pemilihan). Seorang pemimpin gerakan Tarbiyah yang bertanggung jawab dalam pengembangan kader PKS, misalnya, merujuk dan menjelaskan dalam salah satu dokumen resmi mengenai periode ini:

Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun perjuangan untuk memperkuat keberadaan gerakan politik kita demi dakwah (*al wujud al-siyasi li al-dakwah*). Di era ini, semua kader harus menjadi pemilih dan konstituen di masyarakat luas. Para kader harus melakukan dakwah dan politik mereka untuk mendapatkan cinta dan simpati dari masyarakat sehingga mereka dapat bergabung dengan gerakan Tarbiyah dan mendukung partai (PKS).<sup>49</sup>

Pada akhir 1998, karena political opportunity dan kondisi politik berubah, maka wacana tentang perlunya sebuah partai politik muncul dikemukakan oleh para pemimpin dan anggota gerakan

---

<sup>47</sup>Ahmad Norma Permata, *Islamic Party and Democratic Participation: the Prosperous Justice Party (PKS) in 1998-2006*, (Germany: University of Munster, 2008). h. 252.

<sup>48</sup>Yon Machmudi, *Islamizing Indonesia...*

<sup>49</sup>Musyaffa Abdurrahim, *Membangun Ruh Baru; Taujih Pergerakan untuk Para Kader Dakwah*, (Bandung: Harakatuna, 2005), h. 56.

Tarbiyah. Anis Matta, sebagai tokoh utama gerakan Tarbiyah [pernah menjadi presiden PKS], bertanya kepada para aktivis Tarbiyah apakah mereka ingin memasuki arena politik atau tidak. Bahkan ada proses pemungutan suara untuk melihat suara dan pendapat para aktivis Tarbiyah tentang pendirian partai politik. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa sekitar 76% ingin berjuang melalui politik, sedangkan sisanya ingin tetap dengan gerakan dakwah mereka.

Penjelasan dari beberapa literatur menunjukkan bahwa sempat ada debat internal antara anggota senior Tarbiyah tentang keputusan untuk mendirikan partai. Mayoritas setuju untuk memasuki arena politik karena mereka ingin berkontribusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat menjadi lebih baik (*ishlah al-ummah*), melalui partai politik. Sebagian yang tidak setuju berpendapat bahwa sejak awalnya tidak merencanakan untuk mengubah kegiatan dakwah mereka menjadi gerakan politik dan sejak awal tidak ada rencana untuk mendirikan partai politik. Bahkan, beberapa kader ingin menjauhkan gerakan Tarbiyah dari ranah politik. Namun, setelah partai itu didirikan, mereka semua menerima keputusan yang telah dibuat. Namun demikian, perbedaan pendapat ini dan dinamika lebih lanjut dan perkembangan dalam partai menyebabkan konflik internal dan ketegangan muncul di antara anggota senior gerakan Tarbiyah.<sup>50</sup>

Konsep menyatunya agama dan politik adalah salah satu tujuan yang mendorong gerakan Tarbiyah mendirikan partai politik. Mayoritas pimpinan gerakan Tarbiyah seperti yang terbacca dalam literatur, berpegang teguh pada pandangan bahwa tidak ada pemisahan antara dakwah dan politik. Gagasan ini melibatkan implementasi konsep ‘Islam total’ (Islam kaafah) yang dibicarakan secara luas di antara komunitas ini, dan dinyatakan dalam dokumen resmi mereka.<sup>51</sup> Oleh karena itu, pembentukan partai dakwah oleh aktivis Tarbiyah dianggap sebagai kelanjutan dari kegiatan dakwah mereka yang dilakukan secara lebih luas.

---

<sup>50</sup>Ahmad Norma Permata, A Study on the Internal Dynamics...

<sup>51</sup>Berbagai cara politik yang dilakukan PKS merupakan bagian dari gagasan ‘total Islam’, yang terinspirasi oleh para pendiri dan ideolog dari Ikhwanul Muslimin di Mesir yaitu Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb.

Berdasarkan bacaan saya pada salahsatu buku resmi PKS yang berjudul ‘Platform Kebijakan Pembangunan PKS’ menyatakan bahwa tujuan dakwah mereka dalam fase ini harus dipahami sebagai berikut:

Islam tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai manifestasi dari *syura*, *amar ma’ruf nahi munkar* dan berjuang untuk keadilan. Oleh karena itu, PKS telah memilih politik untuk menerapkan nilai-nilai Islam, tidak hanya di tingkat individu dan keluarga, tetapi juga di tingkat masyarakat dan Negara.<sup>52</sup>

Para pendiri, tokoh utama dan aktivis senior partai dengan demikian berusaha menunjukkan bahwa gerakan politik mereka tidak dapat dipisahkan dari dakwah. Para pimpinan ingin menekankan bahwa dakwah masih menjadi perhatian utama mereka, dan bahwa mereka sangat terikat pada persoalan dakwah, meskipun mereka telah mendirikan partai politik. Bahkan pada masa setelah berdirinya PKS, koleksi pidato para pimpinan Tarbiyah/PKS diterbitkan secara resmi oleh PKS di bawah divisi arsip untuk mentransfer dan menyebarkan ide-ide terkait ideologi dakwah gerakan Tarbiyah kepada masyarakat luas. Setelah partai berdiri, publikasi dirasakan sangat penting untuk menyebarluaskan gagasan integrasi dakwah dan politik kepada semua aktivis dakwah, dari anggota senior hingga mereka yang berada di tingkat akar rumput.

Dakwah yang menjadi pegangan PKS adalah dakwah komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk privat dan publik. Pada dasarnya, satu aspek kehidupan tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh dakwah Tarbiyah/PKS. Yang dilakukan PKS di periode ini, menurut mereka, bukanlah proses yang bergerak atau bergeser dari dakwah ke politik, karena politik hanyalah satu aspek dari dakwah komprehensif ini. Oleh karena itu, PKS dapat dilihat sebagai hasil dakwah dari gerakan dakwah Tarbiyah, yang dalam melebarkan dakwahnya ke dalam arena politik ini, tetap menunjuk para aktivis Tarbiyah untuk menjalankan mesin partai sesuai dengan ideologi dakwah mereka.

Untuk memperkuat argumen adanya integrasi dakwah dan politik, para pendiri gerakan menempatkan dakwah sebagai identitas kunci dari partai dan merupakan tujuan berdirinya partai.

---

<sup>52</sup>MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani...*, h. 52.

Bab 2, Pasal 5 -tentang tujuan partai- menegaskan: "PKS adalah partai dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur yang diberkati oleh Allah di dalam Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila".<sup>53</sup>

Selama fase ini, profil PKS sebagai partai dakwah juga diperkuat melalui publikasi buku-buku tentang PKS dan dakwah yang ditulis oleh pimpinan dan kader partai. Mereka menggunakan istilah dakwah sebagai judul buku, dan sebagai kata kunci yang menjadi semangat dalam substansi/isi buku-buku tersebut. Penggunaan istilah 'dakwah' oleh PKS dapat dipahami sebagai pembeda dari partai dan organisasi Islam lainnya. Literatur menunjukkan bahwa mengaitkan istilah 'dakwah' dengan partai tidak hanya dilakukan untuk meyakinkan aktivis Tarbiyah tentang keberlanjutan partai dan gerakan dakwah mereka, tetapi juga untuk membedakan partai dakwah ini dari partai Islam lainnya

PKS adalah partai dakwah memiliki makna bahwa bagi kemenangan PKS dalam seluruh proses pemilihan politik adalah kemenangan dakwah. Namun, ada perbedaan persepsi di kalangan para pemimpin dan anggotanya tentang bagaimana memenangkan pemilu dan bagaimana 'memenangkan' dakwah.<sup>54</sup> Para pemimpin partai seperti mantan presiden PKS Anis Matta (2011), seperti dikutip oleh Hidayat, mengatakan bahwa "Tugas PKS adalah untuk mengambil kesempatan untuk memimpin negara dengan kemampuan dan kualitasnya untuk kepentingan semua masyarakat, dan politik adalah bagian dari implementasi itu."<sup>55</sup> Menawarkan kader terbaik bagi negara untuk memberikan yang terbaik adalah cara untuk memimpin jalan menuju visi ini. Visi ini ditolak oleh beberapa anggota yang berpendapat bahwa proyek politik akan berdampak negatif pada partai dan kader karena sikap politik pragmatismenya.

Namun demikian, ada persepsi kuat didalam literatur bahwa gerakan Tarbiyah dan partai (PKS) memiliki ideologi yang sama. Mereka dianggap memiliki hubungan dekat karena mereka

---

<sup>53</sup>MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani...*

<sup>54</sup>Syahrul Hidayat, *Managing Moderation: The AKP in Turkey and the PKS in Indonesia*, (PhD thesis, University of Exeter, 2012).

<sup>55</sup>Syahrul Hidayat, *Managing Moderation...* h. 234.

memiliki akar ideologis yang sama. Selain itu, para aktivis yang sama mengelola kedua lembaga ini, karena gerakan Tarbiyah dan PKS terdiri dari orang yang sama.<sup>56</sup>

Telah ada beberapa diskusi tentang apakah lembaga-lembaga politik dan dakwah ini harus bekerja sama secara setara di arena yang berbeda, atau apakah salah satu dari mereka harus tunduk kepada yang lain, dan berbagai persepsi tentang hubungan hierarkis antara kedua lembaga ini. Salah satu tokoh kunci gerakan Tarbiyah menekankan bahwa “gerakan Tarbiyah dan partai saling melengkapi satu sama lain”. Ini berarti bahwa kedua lembaga ini memiliki level yang 'setara', dengan harapan bahwa mereka akan saling mendukung. Namun, ada juga yang berpikir sebaliknya, yang menekankan bahwa "partai didirikan sebagai sarana untuk mendukung gerakan dakwah kita". Mereka berpendapat bahwa politik hanyalah salah satu cara memperluas wilayah dakwah (*mihwar dakwah*). Ini menunjukkan bahwa partai seharusnya menjadi bagian dari gerakan Tarbiyah, dan mendukung tujuan gerakan Tarbiyah, dan karenanya partai tersebut harus tunduk kepada gerakan Tarbiyah.

Mengingat bahwa partai didirikan oleh komunitas Tarbiyah, sangat logis untuk mengasumsikan bahwa gerakan Tarbiyah harus mengendalikan partai dan memiliki otoritas mutlak untuk itu. Selain itu, gerakan Tarbiyah jauh lebih tua, dan dengan demikian melihat partai sebagai sarana untuk mendukung dakwah gerakan harus menjadi pemahaman logis dari hubungan mereka. Ini adalah harapan yang dimiliki oleh aktivis senior Tarbiyah. Para pemimpin partai berusaha menyampaikan pesan yang jelas kepada semua kader tentang integrasi agama dan politik, dan perlunya menggunakan politik untuk menegakkan agama. Oleh karena itu, mayoritas kader percaya bahwa transformasi ke gerakan politik adalah ide yang bagus untuk mempromosikan ideologi Tarbiyah mereka melalui pendekatan politik dan formal.

Melalui integrasi politik dan gerakan dakwah, diharapkan PKS dapat mengubah kondisi umat Islam dalam semua aspek kehidupan, dan tentu saja untuk dapat kembali ke kemenangan Islam di masa lalu. Poin ini adalah semangat utama yang telah

---

<sup>56</sup>Ahmad Norma Permata, *A Study on the Internal Dynamics...*

ditransfer oleh para pemimpin awal gerakan Tarbiyah ke generasi berikutnya dari para aktivis Tarbiyah sejak awal 1980-an. Namun, temuan saya menunjukkan bahwa ini bukanlah bagaimana hubungan itu berkembang dalam kenyataan. Meskipun partai itu didirikan oleh gerakan Tarbiyah, ada dua contoh yang menunjukkan bagaimana partai itu sebenarnya berusaha untuk mengendalikan atau menundukkan gerakan Tarbiyah.

Pertama, kajian *liqo* mingguan, yang telah menjadi kegiatan utama Tarbiyah sejak awal munculnya gerakan Tarbiyah, saat ini dikonseptualisasikan dan dikelola oleh Divisi Kader partai. Ini berarti bahwa *liqo* tidak lagi independen dari pengaruh lembaga-lembaga lain diluar gerakan Tarbiyah. Demikian juga, program *liqo* adalah cara utama partai untuk merekrut, memobilisasi, dan membentuk ideologi kader partainya. Selain *liqo*, partai juga turut mewarnai program Tarbiyah lainnya, seperti Dawrah (ceramah agama), Rihlah (tour ke pusat-pusat pariwisata), Mabit (menginap semalam untuk kegiatan ritual seperti membaca Al-Qur'an, berdoa dan berpikir tentang Allah)/Zikir, dan Mukhayyam (camp keagamaan). Meskipun semua kegiatan ini dilakukan oleh komunitas Tarbiyah, isi dan desain program ditentukan dan dikelola oleh divisi partai.<sup>57</sup>

Kedua, topik atau pelajaran (*mawad*) yang harus mereka sampaikan dalam kajian *liqo* mingguan harus merujuk pada buku Manhaj Tarbiyah, yang disiapkan, ditulis dan diterbitkan oleh partai. *Murabbi* (mentor) *liqo* sebagian besar dikelola oleh partai. Mungkin saja *murabbi liqo* di tingkat pemula bukan anggota partai secara formal, tetapi di tingkat yang lebih tinggi, kebanyakan dari mereka adalah anggota partai. Mengingat bahwa *murabbi* di tingkat bawah adalah *mutarabbi* (peserta pelatihan) *liqo* di tingkat yang lebih tinggi juga, semua *murabbi* adalah kader partai.

Namun, penelitian saya mengungkapkan bahwa gerakan Tarbiyah telah digunakan sebagai 'media' untuk memperbesar dan memperkuat dukungan bagi partai. Dengan menyatakan itu sebagai partai dakwah, para pemimpin partai - yang juga anggota senior dan pemimpin gerakan Tarbiyah - bermaksud membangun

---

<sup>57</sup>MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani...*



hubungan emosional antara partai dan semua kader Tarbiyah. Para pendiri berharap bahwa semua kader Tarbiyah akan memiliki rasa memiliki dan pandangan yang sama tentang tanggung jawab mereka kepada partai. Untuk mendorong hal ini, PKS mempromosikan sebuah jargon diantara komunitas Tarbiyah bahwa: “Jamaah (Tarbiyah) adalah partai dan partai itu sendiri adalah jamaah (Tarbiyah)” (*al-jama'ah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-jama'ah*).<sup>58</sup> Prinsip ini digunakan untuk mendorong kader Tarbiyah agar memiliki kewajiban untuk terlibat dalam politik dan mendukung partai di samping keterlibatan mereka dalam kegiatan Tarbiyah.<sup>59</sup>

#### 4. Gerakan Tarbiyah pada Periode Dominasi PKS (2004–sekarang)

Meskipun gerakan Tarbiyah masih memfokuskan dakwahnya pada peningkatan kesalehan individu, gerakan ini berusaha untuk mensinkronkan tujuan ini dengan tujuan partai PKS, yaitu untuk menempatkan kader mereka di lembaga-lembaga negara. Ada banyak fakta yang menunjukkan komunitas Tarbiyah telah terlibat secara intensif dalam mendukung kandidat partai untuk posisi sebagai anggota parlemen, gubernur, dan sebagai presiden, baik dalam pemilihan lokal maupun nasional. Para pimpinan gerakan Tarbiyah dan murabbi *liqo* memobilisasi kader mereka untuk berpartisipasi dalam membuat dan mempengaruhi opini publik untuk membantu kandidat mereka dalam memenangkan pemilihan.

Partai ini telah berpartisipasi dalam pemilihan umum Indonesia sejak 1999, dan popularitasnya telah meningkat secara signifikan, dari mendapatkan 1,36% suara dalam pemilihan umum 1999 meningkat menjadi 7,88% pada tahun 2009. Meskipun jumlah ini menurun sekitar 1% pada pemilihan terakhir pada tahun 2014, Partai ini telah berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia untuk tidak hanya berkomitmen pada dakwah indi-

---

<sup>58</sup>DPP PKS, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula...*h. 33.

<sup>59</sup>Lihat Arief Munandar, *Antara Jamaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam arena politik Indonesia pasca pemilu 2004*, (Disertasi FISIP Pascasarjana Sosiologi, Jakarta, UI, 2011)

vidu,<sup>60</sup> tetapi juga menerima dan melakukan dakwah publik, yang mengarah pada upaya pemberantasan kemiskinan dan korupsi, memberikan pendidikan yang lebih baik dan membantu para korban bencana.<sup>61</sup>

Pada pemilu 1999, PKS sangat ketat dalam memfokuskan kampanye mereka pada isu-isu terkait syariat Islam. Tampaknya mereka menjadi sadar akan fakta bahwa menegakkan syariat tidaklah ‘cukup’ menjadi sebuah agenda yang akan mendorong umat Islam Indonesia untuk mendukung partai ini. Mereka kemudian merubah isu-isu yang mereka promosikan dari isu-isu yang berorientasi syariat Islam menjadi isu-isu yang berorientasi pada masalah kemanusiaan dan nasional agar bisa lebih menarik perhatian publik.<sup>62</sup> Beberapa pengamat telah menunjukkan bahwa transformasi ini adalah pendorong dan ‘akar’ dari pencapaian suara PKS yang signifikan dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014.

Para pimpinan gerakan Tarbiyah yang juga pimpinan PKS menyebut fase dakwah ini sebagai *al-mihwar al-dauli* (fase kelembagaan negara). Fase ini merupakan ‘mobilitas vertikal’, yang bertujuan untuk secara bertahap menembus institusi negara dan organisasi publik lainnya.<sup>63</sup> Gagasan di balik fase ini adalah untuk menyebarkan kader terbaik mereka ke lembaga-lembaga negara, sehingga mereka dapat ‘mereformasi’ atau melakukan Islamisasi ‘dari dalam’.

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Tidak ada yang terhenti dalam tahap ini karena perkembangan

---

<sup>60</sup>Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*; M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2008).

<sup>61</sup>Najwa Shihab & Yanuar Nugroho, *The Ties that Bind: Law, Islamisation and Indonesia's Prosperous Justice Party (PKS)*, (*Australian Journal of Asian Law*, 2008. 10), h. 233-267.

<sup>62</sup>Sebagian dari akibat pergeseran ini, Hidayat (2012) mengatakan bahwa PKS menuai kritik karena sikap pragmatis mereka. Hidayat menilai bahwa ketegangan internal terjadi disebabkan oleh kebijakan pragmatis dari pimpinan partai, tetapi ia berbeda dengan Permata (2008) dalam pandangannya bahwa ketegangan internal ini tidak menyebabkan perpecahan internal. Penelitian Permata menunjukkan sebaliknya, bahwa memang terjadi perpecahan atau keretakan internal di tubuh gerakan Tarbiyah/partai.

<sup>63</sup> DPP PKS, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula...*, hal. 47.

religiusitas individu tetap menjadi fokus. Hal yang berbeda dari tahap lain adalah penyebaran individu-individu ini untuk mempengaruhi (melakukan Islamisasi) tempat kerja mereka melalui nilai-nilai dakwah mereka, seperti di kantor-kantor pemerintah, parlemen, kantor-kantor swasta, dan perusahaan

Menurut buku literatur mengenai gerakan Tarbiyah/PKS, distribusi kader ke kantor-kantor di dalam organisasi negara dan juga di lembaga publik lainnya dianggap sebagai langkah penting dalam menciptakan masyarakat dan negara yang lebih Islami. Para kader itu diharapkan memainkan peran penting dalam mempengaruhi lembaga agar menjadi lebih sejalan dengan ajaran Islam dan menyebarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat luas. Oleh karena itu, mengislamkan ruang publik melalui penyebaran ideologi dakwah mereka adalah tujuan paling penting dari gerakan dakwah dalam fase ini.

Salah satu peran yang dimainkan kader Tarbiyah dalam ‘mereformasi’ (Islamisasi) negara dapat dilihat melalui posisi yang diadopsi anggota parlemen PKS dalam debat parlemen (MPR) selama 2000-2002. Ini menyangkut amandemen Pasal 29 Konstitusi Indonesia (UUD 1945), yang berisi klausul tentang hubungan antara agama dan negara. PKS mengusulkan Piagam Madinah (piagam Madinah), bukan Piagam Jakarta, sebagai inspirasi utama untuk amandemen konstitusi Negara.<sup>64</sup> Para kader Tarbiyah-PKS menuntut agar Pasal 29 diubah, dengan menyatakan bahwa “wajib [bagi negara] untuk menerapkan ajaran agama bagi para pengikutnya”. Mereka berusaha meyakinkan parlemen bahwa negara harus terlibat dalam menjaga religiusitas para penganutnya.

Dalam debat terakhir klausul ini, PKS adalah salah satu dari dua partai politik Islam yang bersikeras bahwa pasal 29 diubah, sementara sebagian besar partai mencabut keberatan mereka.<sup>65</sup> Sebagian besar partai Islam menyukai penyisipan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta. Alasan di balik pilihan PKS adalah: “pertama: untuk menegakkan nilai-nilai agama yang dianut oleh pembukaan

---

<sup>64</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy...*

<sup>65</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy...*

UUD 1945”.<sup>66</sup> Meskipun pilihan PKS ke Piagam Madinah dikritik oleh banyak kelompok Islamis dan dituduh telah mengkhianati komitmennya untuk menerapkan syariah,<sup>67</sup> menurut pendapat saya, bagaimanapun, ini masih menunjukkan bahwa tujuan utama dari Dakwah gerakan Tarbiyah adalah untuk memperkuat karakter Islam negara melalui kader-kadernya di parlemen.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh tiga pemimpin Tarbiyah, yang juga pemimpin PKS terkemuka-Balda, Ridha, dan Wahono (2000)-tugas utama para aktivis Tarbiyah di parlemen adalah untuk mengendalikan, memantau dan mengeluarkan undang-undang yang sejalan dengan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunah. Dalam pernyataan resmi (Bayanat) dari partai tersebut, disebutkan juga bahwa:

Melalui parlemen, PK [PKS] berjuang untuk mengimplementasikan ajaran Islam dan hukum Islam. Perjuangan ini fokus untuk memasukkan unsur-unsur Islam pada produk legislasi di parlemen, seperti hukum sedekah (Zakat), hukum perbankan, hukum pernikahan, dan sebagainya.<sup>68</sup>

Mengingat bahwa gerakan Tarbiyah dan partai saling terkait dalam visi mereka, ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah, pada tahap ini, lebih menantang bagi anggota gerakan Tarbiyah daripada pada tahap sebelumnya. Gerakan Tarbiyah perlu mentolerir serta membenarkan sikap pragmatis partainya. Namun, perlu dicatat bahwa, sebagai partai politik di negara demokratis, PKS harus menarik sebanyak mungkin pemilih dari kelompok sosial yang berbeda, dan Pemilihan Umum 1999 membuktikan bahwa sikap mereka terhadap masalah syariah tidak menciptakan diskursus public atau kesan yang baik pada masyarakat luas, dengan partai yang meraih kurang dari 2% suara nasional.

Dengan demikian, dalam Pemilu 2004, partai tersebut pindah dari kampanye untuk syariah, lebih memilih untuk memperjuangkan isu-isu yang lebih ‘sekuler’, seperti pendidikan untuk orang miskin dan agenda anti-korupsi.<sup>69</sup> Pada tahun 2007, partai

---

<sup>66</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy*.....h. 202-203.

<sup>67</sup>Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy*...

<sup>68</sup>DPP PK, *Bayanat*, (Jakarta: DPP PKS, 1999).

<sup>69</sup>Lihat Muhtadi, 2012; Permata, 2008; Shihab dan Nugroho, 2008.

bahkan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk kebijakan pluralisme agama, memilih beberapa non-Muslim untuk kandidat parlementer dalam pemilihan 2009.<sup>70</sup> Lebih jauh lagi, salah satu literatur mengungkapkan bahwa partai tersebut membangun hubungan dekat dengan seorang sarjana Muslim liberal, Nurcholish Madjid, yang sebelumnya telah dikecam sebagai seorang tokoh yang merusak Islam dari dalam. Menurut Hilmy, tidaklah mengejutkan bahwa PKS secara eklektik mengadopsi banyak sudut pandang intelektual dari berbagai sumber termasuk yang ‘liberal’ selama ‘mereka membantu meningkatkan kekuatan partai’.<sup>71</sup> Meskipun masalah pluralisme agama sangat kontroversial bagi komunitas Tarbiyah, kebanyakan dari mereka mematuhi dan mendukung pilihan politik pragmatis yang dibuat partai.

Namun, ada juga kritik yang signifikan terhadap pilihan pragmatis partai dari para pemimpin kunci dalam komunitas Tarbiyah dan anggota pendiri PKS, seperti Daud Rasyid, seorang

---

Namun Platzdasch (2009) berpendapat bahwa penerimaan mereka terhadap nilai-nilai modern sebetulnya lebih bernuansa simbolik daripada substantive. Platzdasch (2009), yang melakukan perbandingan tiga partai Islam di Indonesia yaitu PKS, PPP dan PBB, menunjukkan bahwa upaya mereka mempromosikan agenda-agenda bernuansa ‘sekuler’ seperti reformasi sosial dan politik, anti korupsi, dan Hak Azasi Manusia (HAM) adalah untuk kepentingan menarik audiens eksternal, karena agenda-agenda ini sangat kontras dan berbeda dengan wacana internal dikalangan mereka yang sangat Islamis dan focus kepada agenda-agenda berbasis syariah.

<sup>70</sup>Lihat Permata, 2008. Masdar Hilmy (2010) yang melakukan kajian mengenai PKS dalam perbandingannya dengan dua organisasi keagamaan lain yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebagai contoh mengkalsifikasikan PKS sebagai organisasi yang menerima nilai-nilai kemodern-an Indonesia tetapi mereka berusaha untuk melakukan Islamisasi. PKS menurut Hilmy adalah contoh ‘meliorist’ Islamism yang didefinisikan sebagai “*those who occupy the in-between position; on the one hand these Islamists stand firm on their Islamic identity but on the other hand they try to accommodate democracy as a means of political struggle*” (2010: 7)

<sup>71</sup>Hilmy dalam mengkaji PKS, MMI dan HTI, membagi Islamisme ke dalam dua kategori: 1) Islamisme utopis yaitu mereka yang menolak sistem yang ada dan nilai-nilai modern dan terobsesi membangun negara dan komunitas yang ideal berdasarkan Islam, seperti MMI dan HTI; dan 2) Islamisme melioris yaitu mereka yang menerima sistem dan nilai-nilai modern tetapi berupaya mengendalikannya dengan mengislamkannya, misalnya, PKS. (Lihat Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy...*, h. 204.

dosen di Universitas Negeri Islam Bandung, dan Yusuf Supendi, seorang ulama yang cukup dikenal dalam komunitas Tarbiyah. Keterbukaan partai terhadap pluralisme agama dan tokoh-tokoh Muslim liberal mengecewakan para pemimpin ini dan aktivis gerakan Tarbiyah lainnya, yang mendukung pembentukan PKS. Mereka lebih tertarik untuk mempertahankan ideologi dakwah dari gerakan Tarbiyah. Namun demikian, ada pula kader lain yang 'setia' terhadap gerakan Tarbiyah tetapi juga mematuhi partai, meskipun mereka tidak setuju dengan pendekatan politik pragmatismenya.

### **Penutup**

Tulisan ini telah menjelaskan perkembangan historis dakwah gerakan Tarbiyah, dan bagaimana gerakan ini mengembangkan pesan dan strategi dakwahnya terkait dengan berbagai peluang politik yang ada. Saya berpendapat bahwa meskipun wacana resmi para pemimpin gerakan menyatakan bahwa pesan dakwah utama mereka pada tahap-tahap awal gerakan menekankan pada kesalehan individu, mereka juga sebenarnya memiliki agenda Islamisasi publik, tetapi menunggu iklim dan peluang politik yang tepat untuk mewujudkannya.

Dengan demikian mereka menggunakan berbagai strategi dakwah untuk menyampaikan pesan mereka di berbagai iklim politik yang terus berubah di Indonesia. Perubahan dalam strategi dakwah mereka dapat dilihat dalam kegiatan *liqo* (pengajian 'kecil' yang dilakukan rutin setiap minggu), sebagai fokus kegiatan dakwah utama mereka. Mereka pertama kali mengadakan *liqo* disesuaikan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi pada periode awal kemunculan gerakan Tarbiyah dan kemudian mengembangkannya lagi ketika peluang politik berubah sebelum pendirian PKS dan selama periode PKS.

Dalam kondisi represif rezim otoriter di awal tahun 1980-an, komunitas Tarbiyah menggunakan pendekatan dakwah 'rahasia' untuk mencegah gerakan ini dibubarkan oleh rezim yang memusuhi Islam politik. Mengingat iklim politik yang begitu sulit, kegiatan *liqo* atau *halaqah* dilakukan secara informal dan secara diam-diam di sudut-sudut masjid di kampus-kampus yang terletak di perkotaan. Pendekatan dakwah yang lebih terbuka mulai

dipraktikkan sejak akhir 1980-an, ketika rezim mulai menjadi lebih akomodatif terhadap Islam politik, demi mendapatkan dukungan dari umat Islam.

Pada periode ini, gerakan Tarbiyah mulai menjangkau khalayak yang lebih luas dan mulai menyampaikan pesan dakwah melalui berbagai kegiatan yang lebih formal di ruang publik yang lebih besar, misalnya, memberikan ceramah/khutbah, menjalankan berbagai kelas kajian agama, dan mendirikan pusat-pusat penerbitan, pendidikan dan sosial. Melalui program-program ini, mereka berusaha untuk menarik masyarakat yang potensial berminat untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka dan mengembangkan religiusitas mereka melalui *liqo* atau *halaqah*.

Dengan jatuhnya pemerintahan otoriter pada tahun 1998 dan munculnya pemerintahan pasca-Orde Baru, komunitas Tarbiyah mengambil kesempatan untuk mendirikan partai politik Islam bernama Partai Keadilan (PK). Partai ini kemudian diberi nama baru yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2003. Para pemimpin gerakan Tarbiyah berpendapat bahwa partai akan digunakan sebagai sarana mereka untuk menyebarkan pesan dakwah mereka. Tujuan dakwah pada periode ini adalah untuk mendorong ideologi mereka memiliki akses yang lebih besar pada kekuasaan dan pengaruh politik dan untuk membangun fondasi yang kuat untuk menyebarkan pesan-pesan Islam mereka di berbagai lembaga negara.

Jika pada masa awal pesan dakwah gerakan Tarbiyah adalah untuk melakukan reformasi religiusitas individu dan untuk membentuk gaya hidup yang lebih Islami, dengan tujuan agar secara bertahap menghasilkan reformasi dan mengarah pada penciptaan masyarakat Islam, maka pada perkembangan berikutnya, dakwah informal gerakan Tarbiyah semakin disubordinasikan ke partai politik yang bersifat lebih formal. Jika sebelum pembentukan partai para pimpinan gerakan Tarbiyah hanya benar-benar fokus dengan dakwah, namun kemudian sampai saat ini dakwah digunakan sebagai 'medium' untuk mencapai tujuan politik partai.[]

## **Daftar Pustaka**

- Abdurrahim, M.. *Membangun Ruh Baru; Taujih Pergerakan untuk Para Kader Dakwah*. Bandung: Harakatuna. 2005
- Al-Arian, A. *Answering the Call; Popular Activism in Egypt (1968-1981)*. New York: Oxford University Press. 2014.
- Bruinessen, M.V. Ghazwul fikri or Arabisation? Indonesian Muslim responses to globalisation. In Ken Miichi and Omar Farouk (eds.), *Dynamics of Southeast Asian Muslims in the era of globalization* (pp. 47-70). Tokyo: Japan International Cooperation Agency Research Institute (JICA-RI). 2013.
- Clark, J. *Islam, Charity and Activism: Middle Class Network and Social Welfare in Egypt, Jordan and Yemen*. Bloomington: Indiana University Press. 2004.
- Damanik, A. S. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002.
- DPP PK. *Bayanat*. Jakarta: DPP PKS. 1999.
- DPP PKS. *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*. Bandung: DPP PKS dan PT Syamil Cipta Media. 2003.
- Effendy, B. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). 2003.
- Fox, J. *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*. New York: Routledge. 2012.
- Hasan, N. *Jihad Islam: Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia*. Utrecht: Utrecht University Press. 2005.
- Hefner, R. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press. 2000.
- Hidayat, S. *Managing Moderation: The AKP in Turkey and the PKS in Indonesia*. PhD thesis, University of Exeter. 2012.
- Hilmy, M. *Islamism and Democracy; Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS. 2010.
- Jamhari, J. & Jahroni, J. (eds.) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Kahin, A. *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir*. Singapore: NUS Press. 2012.



- Latif, Y. *Indonesian Muslim Intellegentsia and Power*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2008.
- Lia, B. *The Society of the Muslim Brothers in Egypt: the rise of an Islamic mass movement 1928-1942*. Reading: Ithaca Press. 1998.
- Luthfi, A. Gerakan *Dakwah* di Indonesia. In Ash-Shidiqy, J. (ed.) *Bang Imad: Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya*. Solo: Gema Insani Press. 2002.
- Machmudi, Y. *Islamizing Indonesia: the Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*. Canberra: The Australian National University. 2006.
- Mandaville, P. G. *Global Political Islam*. London: Routledge. 2007.
- Mietzner. *Military, Politics, Islam and the State in Indonesia; from turbulent transition to democratic consolidation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2009.
- Mitchell, R. *The Society of the Muslim Brothers*. Oxford: Oxford University Press. 1993.
- MPP PKS. *Memperjuangkan Masyarakat Madani; Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*. Jakarta: MPP PKS. 2008.
- Muhtadi, B. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG-Gramedia. 2012.
- Munandar, A. *Antara Jamaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam arena politik Indonesia pasca pemilu 2004*. Disertasi FISIP Pascasarjana Sosiologi Jakarta. 2011.
- Permata, A. N. *Islamic Party and Democratic Participation: the Prosperous Justice Party (PKS) in 1998-2006*. Germany: University of Munster. 2008.
- Permata, A. N. "A Study on the Internal Dynamics of the Justice and Welfare Party (PKS) and Jama'ah Tarbiyah", in *Regime Change, Democracy, and Islam: the Case of Indonesia*. Leiden: Universiteit Leiden. 2013.
- Platzdasch, B. *Islamism in Indonesia; Politics in the Emerging Democracy*. Singapore: ISEAS. 2009.
- Prayogi, A. Masuk dan Berkembangnya gerakan Tarbiyah, Studi Kasus: Gerakan Dakwah Kampus di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) 1983-1998, *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 1(1). 2019: 45-57.
- Rahmat, I. *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS. 2008.

- Saleh, F.T. 2015. Manhaj Tarbiyah dalam pendidikan politik PKS, *Salam*, 18 (1).
- Shihab, N. & Nugroho, Y. 2008. The Ties that Bind: Law, Islamisation and Indonesia's Prosperous Justice Party (PKS). *Australian Journal of Asian Law*, 10, hal.233-267.
- Snow, D. dan Marshall, S. 1984. Cultural Imperialism, Social Movements, and the Islamic Revival, in *Research in Social Movements, Conflict and Change*. 7, hal.131-152.
- White, J. 2002. *Islamist Mobilization in Turkey; a study in a vernacular politics*. Seattle: Washington University Press.
- Wickham, C. R. 2002. *Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt*. New York: Columbia University Press.
- Wiktorowicz, Q (ed). 2004. *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach*. Indiana: Indiana University Press.
- Wiktorowicz, Q (ed). 2001. *The Management of Islamic Activism; Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan*. New York: State University of New York.